

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERIMAAN ARISAN UANG
DENGAN SISTEM BAYARAN**

(Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman di Bandarjaya)



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Program Studi Muamalah**

Oleh:

VICKY HAZMI

1521030181

Jurusan: Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERIMAAN ARISAN UANG DENGAN SISTEM BAYARAN

**(Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman
di Bandarjaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Program Studi Muamalah**

Oleh:

VICKY HAZMI

NPM. 1421030186

Jurusan: Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang (*Qard*) yang dilakukan secara berkala dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Arisan masuk ke dalam kategori *qard* yang bentuknya berupa pinjaman tanpa mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali setelah waktu yang ditentukan. Arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong menolong). Pelaksanaan arisan yang terjadi di PKDP Bandar Jaya menggunakan sistem bayaran yang berbeda dengan arisan pada umumnya, sistem yang digunakan adalah dengan pembayaran sejumlah uang bagi anggota arisan yang ingin didahulukan untuk memenangkan arisan. Pelaksanaan arisan seperti ini tak jarang menimbulkan permasalahan terutama dari segi hukumnya, oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan sistem bayaran.

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya adalah, bagaimana mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran pada persatuan keluarga daerah piaman di Bandarjaya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran pada persatuan keluarga daerah piaman di Bandarjaya, dan untuk tinjauan hukum Islam tentang mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang bersumber langsung pada PKDP Bandar Jaya dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan pada tempat penelitian, metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden, dan dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip yang menunjang penelitian. Sedangkan pengolahan datanya dengan teknik *editing* terhadap data yang diperoleh, *organizing* yaitu menyusun data yang telah diperoleh, *analizing* yaitu analisis data sehingga dapat difahami dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, Mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran pada Persatuan Keluarga daerah Piaman di Bandar jaya, tidak sesuai dengan syariat Islam karena semakin lama seseorang peserta memenangkan arisan, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh dan semakin cepat seseorang memenangkan arisan, maka semakin sedikit keuntungan yang diperoleh. Penerimaan arisan uang pada Persatuan Keluarga daerah Piaman di Bandarjaya pada praktiknya adalah haram karena adanya penambahan yang merupakan kelebihan dari pembayaran utang yang seharusnya di tiadakan, karena kelebihan tersebut tergolong dalam perbuatan riba *qard* dan arisan uang dengan sistem bayaran tersebut menjadi haram hukum nya menurut ketentuan hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENERIMAAN ARISAN UANG DENGAN
SISTEM BAYARAN (Studi Kasus Pada
Persatuan Keluarga Daerah Piaman di
Bandarjaya)**

Nama : **VICKY HAZMI**
NPM : **1421030186**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I **Pembimbing II**


Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
NIP. 196010211991031002


Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 19910709201801200

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran (Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman di Bandarjaya)** disusun oleh Vicky Hazmi NPM. 1421030186 Jurusan Muamalah telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari / tanggal : Selasa, 31 desember 2019, Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB di Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji Utama : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Penguji Pendamping II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah – 275)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Atas ridho Allah SWT. dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah dan Ibuku tercinta (Hirmaizal dan Mazriyenni) terimakasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.
2. Uni Viza dan Uni Vina yang selalu mendukung dan mendo'akanku
3. Keluarga besarku, terimakasih atas kasih sayang, kebersamaan dan dukungan kalian semua.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syaria'h Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu mendidik, mengajarkan serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Vicky Hazmi, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Juli 1996, putra ketiga dari bapak Hirmaizal dan ibu Mazriyenni.

Riwayat Pendidikan:

1. TK Kartini 2 Bandar Lampung pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2002
2. SDN 2 Palapa Bandar Lampung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008
3. SMPN 21 Bandar Lampung pada tahun 2008 dan selesai tahun 2011
4. SMA Printis 2 Bandar Lampung pada tahun 2011 selesai tahun 2014
5. Universitas Islam Negeri Lampung mengambil Prodi Muamalah pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufik serta hidayah nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shawalat serta salam kita junjungagungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran (Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman di Bandarjaya)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menmpuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritik dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

2. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu mendirikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Universitas Lampung, dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
6. Saiful Bahri ketua PKDP Bandar Jaya, Siska Rita Dona ketua arisan PKDP Bandar Jaya dan para anggota arisan Annisa, Riza, Heri, Yudi, Neta, Fauzan, Dahlan, Fakhri, Rudi, Ismail, Nuraini, Khansa, Icha, Mega, Wela, Ana, Yugo, Rizal, Iwan terimakasih banyak sudah ikut berpartisipasi dalam penelitian.
7. Yuni Ardiani yang telah menemani berjuang dan selalu memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku rudo Dolar, Wendy, Rama, Sayid, Yogi, Genta, Guntur, Aby, Alfian, Yudha, Reksa. terimakasih atas masukan-masukannya dalam pembuatan skripsi ini

9. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah angkatan 2014, khususnya sahabatku yang ada di kelas Muamalah f, telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku kance lawas Rendi, Ridho, Rifky, Bellia, Annisa, Febby, Tari. Terimakasih atas dukungannya selama ini.
11. Teman-teman Brudul terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.
12. Elmeraat photo dan cinema Dwi Julizar, Dowi Hermana, A ifzan Arif M. Terimakasih atas masukan nya selama ini.



Bandar Lampung, 19 November 2019

Penulis,

Vicky Hazmi
NPM. 1421030186

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad. 15
2. Dasar Hukum Akad 16
3. Rukun dan Syarat Akad..... 19
4. Macam-Macam Akad 23
5. Berakhirnya Akad. 27

B. *Qard*/Utang piutang

1. Pengertian *Qard*. 27
2. Dasar Hukum *Qard*. 29
3. Rukun dan Syarat *Qard*. 34
4. Macam-Macam *Qard*. 43
5. Berakhirnya Akad *Qard*. 44

C. Pembahasan Tentang Riba

1. Pengertian Riba 45
2. Dasar Hukum Riba 47
3. Jenis-Jenis Riba 51
4. Sebab-Sebab Diharamkannya Riba 55

D. Tinjauan Pustaka..... 56

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Persatuan Keluarga Daerah Piaman Bandar Jaya 58

B. Praktek Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman di Bandar Jaya 62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran pada persatuan keluarga daerah piaman di Bandarjaya..... 69

B. Tinjauan hukum Islam tentang penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran.....	72
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Arisan Uang Menggunakan Sistem Bayaran.....	66
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Kepengurusan PKDP	60
Tabel 2 Daftar Anggota Arisan Bayaran PKDP Bandar Jaya	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami pembahasan yang akan dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran (Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman di Bandarjaya)”.

Adapun Beberapa Istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

Hukum Islam merupakan hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan mayarakat, dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.¹

Penerimaan merupakan proses, cara, perbuatan menerima.²

Penerimaan uang dari hasil undian atau kocokan arisan.

¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001), h. 21.

² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2008), h. 1509.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³

Uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang.⁴

Bayaran adalah uang yang dibayarkan; biaya; ongkos.⁵ Bayaran yang dimaksud adalah untuk mendapatkan uang arisan pada giliran pertama.

Persatuan Keluarga Daerah Piaman Bandar Jaya adalah merupakan suatu organisasi para perantau Minangkabau yang berasal dari wilayah administrasi Kota Pariaman dan Kabupaten Pariaman dan sekitarnya yang merantau dan tinggal di daerah Bandar Jaya.

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan dari penegasan judul ini adalah meninjau serta menganalisis dari ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran di PKDP Bandar Jaya.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran (Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman di Bandarjaya)” adalah :

³ *Ibid.*, h. 90.

⁴ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), h. 2

⁵ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 153.

1. Secara Objektif, karena sistem pelaksanaan arisan yang dilakukan oleh pemuda pemudi Sumatera Barat di Bandarjaya dikhawatirkan tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.
2. Secara Subjektif, penelitian ini merupakan salah satu permasalahan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang dimana kajian tentang Praktik *qard* (utang) dan *riba* (tambahan) merupakan salah satu kajian dalam bidang Muamalah yang dilihat dalam Perspektif Hukum Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan nya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial budaya.⁶ Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan segala perintah-Nya. Sebagai individu, manusia harus memenuhi kebutuhan pribadinya dan sebagai makhluk sosial-budaya harus hidup berdampingan oleh orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.

Setiap manusia, terdapat dorongan atau pun kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dorongan ataupun kebutuhan yang dimaksud didasari oleh adanya kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Hubungan antar manusia yang demikian di dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia. Dalam bermu'amalah ada bermacam-macam

⁶ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 48.

bentuk dan cara di antaranya dengan jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, dan sebagainya.⁷

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syariah.⁸ Adapun akad dalam muamalah yaitu akad *qard* (pinjaman).

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain sebagai pinjaman tanpa mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa *qard* bersifat sementara karena adanya pengembalian dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan, baik dilakukan secara sekaligus ataupun cicilan dan tidak adanya imbalan atas peminjaman tersebut. Jika ada imbalan atau tambahan atas peminjaman tersebut tergolong riba yaitu tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad.¹⁰

Seiring perkembangan zaman, aktivitas muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena sosial dalam bermuamalah yang dimaksud dapat ditandai bahwa aktivitas tersebut belum pernah ada pada masa Rasulullah saw. Hal ini dilatar

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2-5.

⁸ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 22.

⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 95.

¹⁰ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h.

belakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda. Salah satu bentuk aktivitas muamalah kekinian yang diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan.

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala. Arisan diberlakukan dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu sekali penarikannya, dan ada juga yang dua minggu ataupun diberlakukan sebulan sekali penarikan. Jadi, masa atau periode yang diberlakukan di dalam arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para peserta yang mengikutinya.

Selain itu, arisan memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana atau wadah untuk menabung dan utang piutang. Arisan sebagai sarana untuk menabung dapat dilihat dengan adanya penyetoran sebagian harta kepada ketua sebagai pemegang amanah dan pada waktu tertentu akan dapat diterima kembali sebesar yang telah dan akan disetorkan. Dalam hal utang piutang, terdapat pihak debitur dan kreditur di dalamnya. Adapun yang menjadi pihak debitur adalah peserta yang memenangkan arisan lebih cepat dari pada peserta lain yang belum memenangkan arisan tersebut, sehingga peserta yang belum memenangkan arisan disebut sebagai kreditur dikarenakan memberikan modal kepada peserta yang memenangkan arisan itu.

Dengan demikian, arisan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menumbuhkan sifat hemat dalam diri dan juga membangun sikap saling tolong menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹¹

Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak memiliki keuntungan. Artinya, uang yang kita tabung selama satu putaran sama saja dengan yang kita peroleh.¹² Bedanya hanya terletak pada perolehan arisan yang didapatkan oleh peserta di awal periode, yaitu seperti mendapatkan utang dan bias dicicil tanpa bunga. Akan tetapi kalau kita mendapatkan di akhir, kita seperti menabung tanpa dapat bunga atau bagi hasil. Arisan dijadikan sebagai sarana berkumpul nya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong menolong) meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini dapat diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Diponegoro, 2014), h. 31.

¹² Ahmad Gozali, *Cashflow for Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top* (Bandung: PT MizanPublika, 2005), h. 65.

piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama dengan dilakukan nya perkumpulan antar sesama peserta arisan.

Selanjutnya, arisan yang berlaku di dalam masyarakat juga memiliki objek dan pola yang berbeda. Ada yang berbentuk uang, benda, proyek, sembako dan sebagainya. Selain itu, pola yang digunakan juga beraneka ragam seperti menggunakan pola undian, jual beli, gadai dan lainnya. Seperti halnya arisan yang berlaku di persatuan keluarga daerah piaman daerah Bandarjaya.

Arisan yang berlaku di Persatuan keluarga daerah Piaman daerah Bandarjaya salah satunya adalah arisan uang dengan menggunakan sistem bayaran. Sistem bayaran yang diberlakukan yaitu dengan melakukan penawaran bayaran yang setinggi-tingginya untuk memenangkan atau mendapatkannya. Namun, terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya yaitu dalam bentuk objeknya. Objek dari lelang yaitu barang yang unik atau langka, sedangkan di dalam arisan, yang dimaksud dengan bayaran adalah untuk mendapatkan kesempatan sebagai pemenang arisan pada periode tertentu.

Adapun pihak yang dapat memenangkan arisan uang dengan sistem bayaran ini adalah pihak yang mampu memberi bayaran lebih kepada peserta-peserta yang belum memenangkan arisan tersebut, total pendapatan yang seharusnya diperoleh dikurang dengan jumlah bayaran yang akan diberikan untuk memenangkan nya. Selanjutnya, uang bayaran tersebut dibagikan kepada pihak peserta arisan yang belum pernah memenangkan arisan

tersebut, sedangkan peserta yang sudah pernah memenangkan arisan tersebut tidak mendapatkan bagian. Misalkan jumlah peserta arisan terdiri dari 4 orang yaitu budi, fuad, cici, dan siti. setiap peserta arisan membayar Rp. 1.000.000,- setiap bulan sehingga jumlah total uang yang terkumpul dari peserta arisan adalah sebesar Rp. 4.000.000,-. Dari keempat peserta arisan tersebut budi melakukan penawaran pembayaran untuk mendapatkan pemenang pada periode pertama dengan menawarkan bayaran sebesar Rp. 600.000,- dari jumlah total uang yang ia dapatkan. Uang perolehan yang seharusnya ia dapatkan dikurangi dengan jumlah tawaran bayaran yang ia berikan sehingga total perolehan yang ia sebesar Rp. 3.400.000,- sedangkan uang bayaran tersebut dibagikan kepada ketiga peserta arisan yang lain dengan masing masing sebesar Rp. 200.000,- perorang.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa semakin lama seseorang peserta memenangkan arisan, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh dan semakin cepat seseorang memenangkan arisan, maka semakin sedikit keuntungan yang diperoleh.

Selain itu, para peserta yang sudah memenangkan arisan ini, tidak dapat keluar begitu saja. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab untuk mengembalikan uang kepada peserta lain yang belum memenangkannya. Dari sini terlihat bahwasannya telah terjadi utang piutang di antara para peserta arisan.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah akad *Qard* (piutang). Dalam hukum Islam utang piutang atau *Qard* diperbolehkan apabila jumlah,

berat ataupun jenis yang dipinjamkan sama dengan yang akan dikembalikan nantinya oleh si peminjam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk memahami dan menjelaskan akad *Qard* atau utang piutang yang menjadi akad di dalam arisan dengan sistem bayaran tersebut dan juga prinsip keadilan yang diberlakukan di dalamnya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran (Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman Di Bandarjaya)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran pada persatuan keluarga daerah piaman di Bandarjaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran pada persatuan keluarga daerah piaman di Bandarjaya.
 - b. Untuk tinjauan hukum Islam tentang mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang pandangan hukum Islam tentang penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.¹³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Mengingat dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber pada toko gadai swasta.

Selain dengan metode lapangan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*,

¹³ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.19.

yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁴ Alasannya untuk memperkuat data-data yang diperoleh dilapangan.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif normatif analisis, yang bertujuan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada dilapangan. Dalam hal ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran menurut perspektif hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.¹⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari mewawancarai peserta arisan uang di Persatuan keluarga daerah Piaman.

b. Data Sekunder

¹⁴ *Ibid.*, h. 23.

¹⁵ Suryabrata Sumardi, *metode penelitian*, Cet ke II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998) h. 15.

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian yang dimaksud.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jenis dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Dalam hal ini populasi berjumlah 20 orang yang mengikuti arisan Persatuan Keluarga Daerah Piaman.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Menurut Suharsini Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua.¹⁶ Sehingga sampel dalam penelitian ini terdiri dari beberapa populasi yang ada yang berjumlah 20 orang yang mengikuti arisan Persatuan Keluarga Daerah Piaman.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 118

penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:¹⁷

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Untuk melengkapi data laporan yang sedang diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan yang telah ditentukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini peneliti mewawancarai peserta arisan uang Persatuan keluarga daerah Piaman.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

5. Pengolaan Data

Setelah data dikumpulkan melalui beberapa tahapan diatas, peneliti di dalam mengolah datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁸

¹⁷ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Psuat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 91.

- b. Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.¹⁹

6. Metode analisis data

Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, dalam hal ini dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti dan menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, h. 122.

¹⁹ Moersaleh dan Musanef, *Pedoman Pembuatan Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 79.

²⁰ Lexy L. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Secara bahasa (etimologi) '*Aqad* memiliki beberapa arti antara lain, dari kata (الرَّبْطُ) yang berarti *mengikat*, (عَقْدَةٌ) berarti *sambungan*, (الْعَهْدُ) berarti *janji*. Istilah '*ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.

Perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('*aqad*).²¹

Secara istilah (terminologi), yang dimaksud akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

pihak.²² Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 KHES (*kompilasi hukum ekonomi syariah*) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad dalam hukum Indonesia disebut perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa belanda *verbinten*. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum dapat berupa perbuatan seperti: jual beli, utang-piutang, upah mengupah, dan hibah. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak lainnya. Dalam hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditor), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut debitor.²³

2. Dasar Hukum Akad

Adapun dasar hukum tentang akad baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 44

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 229.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ

أَلَّا نَعْمَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ

اللَّهُ سَخَّكُم مَّا يُرِيدُ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*²⁴

Ayat di atas diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia dan berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Adapun istilah *Al-Ahdu* atau perjanjian seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran (3) ayat 76 sebagai berikut:

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008). h.141.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.²⁵

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada perjanjian yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.²⁶

b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Hadits tentang akad salah satunya diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ²⁷

²⁵ Ibid., h. 59.

²⁶ Sohari dan Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 42

²⁷ Hadits bukhori

Artinya: Dikabarkan kepadanya hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda : "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR Bukhori dan Muslim).

Berdasarkan hadits di atas menjelaskan bahwasanya setiap orang di perbolehkan dan dibebaskan untuk melakukan sebuah akad dan diberikan hak kepadanya untuk meneruskan akad tersebut atau membatalkannya, hal itulah yang menjadi dasar hukum akad dari as-Sunnah.

c. Dasar Hukum dari Ijma'

Para ulama telah sepakat mengenai ketentuan akad bahwa akad adalah sesuatu perbuatan yang mengawali adanya perjanjian ikatan. Akad telah dianggap sah dengan adanya pengucapan lafal perjanjian baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis yang memuat ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak.²⁸

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-

²⁸ Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 30.

masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:²⁹

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berkakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (*pemberian*), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok pinjaman (*i'arah* atau *al'ariyah*) adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h.51.

4) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *Panjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

b. Syarat Akad

Syarat akad menurut pendapat Madzhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*shahih*), rusak (*fasid*) dan syarat yang batal (*bathil*) dengan penjelasan berikut ini:³⁰

- 1) Syarat sah adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh *syara'*, sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*urf*). Misalnya harga barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli, adanya hak pilih (*khiyar*) dan syarat sesuai dengan *urf*, dan adanya garansi.
- 2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat sah. Misalnya, memberi mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 20.

3) Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akad tetapi malah menimbulkan dampak negatif. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibelinya.

Syarat dalam pembentukan akad dibedakan menjadi 2 yaitu, syarat umum dan khusus yang akan dijelaskan sebagai berikut:³¹

1) Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat tersebut meliputi:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak; tidak sah orang yang berakad tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang dibawah pengampunan (*majhur*) karena boros, dan lainnya;
- b) Yang dijadikan objek akad menerima hukumnya;
- c) Akad itu diizinkan oleh syariat selama dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang;
- d) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh syariah, seperti jual beli *mulasamah*;
- e) Akad dapat memberi faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah;

³¹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h.30.

f) Ijab tidak boleh dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka, bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka ijabnya batal;

g) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila orang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2) Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyariatkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan (*idhafi*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

4. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad:³²

- a. '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pembayaran akad diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. '*Aqad Mu'alaq* yaitu ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 50.

c. '*Aqad Mudhaf*' ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain akad munjiz, mu'alaq, dan mudhaf, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjaunnya. Karena adanya perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.

a. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian:

- 1) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
- 2) Akad *gahir musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.

b. Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:

- 1) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
- 2) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.

c. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:

- 1) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.

2) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.

d. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:

1) Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

2) Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.

e. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

1) Akad yang harus dilakukan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.

2) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.

f. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

1) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.

2) Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta)

g. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:

- 1) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
- 2) Akad *tabaru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
- 3) Akad yang *tabaru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.

h. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
- 2) Akad *amanah* yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
- 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).

i. Tujuan akad, dari segi tujuan akad dapat dibagi menjadi lima golongan:

- 1) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli
- 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* atau *mudharabah*.
- 3) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.

- 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiayah.
- 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.

5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya suatu akad apabila unsur-unsur di bawah ini terpenuhi, di antaranya:³³

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi;
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah;
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

B. Qard (Utang piutang)

1. Pengertian Qard

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 35.

Berbicara mengenai utang piutang bukanlah suatu hal yang asing didengar, dikarenakan utang piutang sering dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini merupakan perjanjian antara pihak yang memberikan pinjaman dan yang menerima pinjaman. Pada umumnya objek yang diperjanjikan adalah uang.³⁴

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³⁵

Utang piutang (*qard*) dalam Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *qard* yang mulanya merupakan akad kebajikan atau akad yang bersifat sosial namun ketika di akhir akad ini berubah menjadi akad yang bersifat timbal balik. *Qard* merupakan bentuk *maṣdar* (kata kerja yang dibendakan) dari *qarada asy-sya'i yaqridu*, yang berarti dia memutuskannya. Secara etimologi, *qard* berarti *al-qat'* yang berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtariḍ* (debitur) dinamakan *qard* sebab merupakan potongan dari harta *muqriḍ* (kreditur).³⁶

Selain itu, *al-qard* dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Dalam definisi lain dikatakan

³⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 97.

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151.

bahwasannya *qard* adalah pinjaman yang dapat diperdagangkan, yang kemudian dibayarkan kembali secara setimpal.³⁷

Adapun *qard* secara terminologis yaitu harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu untuk membayarnya.³⁸ Di samping itu, *qard* secara terminologis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam hal meminjam harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.³⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa *qard* bersifat sementara dikarenakan adanya pengembalian di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan, baik dilakukan secara sekaligus ataupun cicilan dan tidak adanya imbalan atas peminjaman tersebut.

2. Dasar Hukum *Qard*

Adapun yang menjadi dasar hukum ataupun landasan hukum dari utang piutang dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an, Hadits dan juga *ijmā'*. Dasar hukum utang piutang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut:

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

³⁷ M. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani, *Hukum Keuangan Islam*, (Bandung: Nusamedia, 2007), h. 351.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 115.

³⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 205.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا

كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan”.⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah SWT. sangat menganjurkan dan mendorong umat Islam agar menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian, Allah akan memberi penghargaan kepada umat yang melaksanakan anjuran tersebut dengan melipat gandakan pahala sebagai balasan atas pinjaman tersebut.

Selain itu, dasar hukum utang piutang juga terdapat di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).
h. 60.

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya....”⁴¹

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan pencatatan dalam transaksi yang dilakukan secara tidak tunai (utang piutang) baik tentang jumlah utang maupun tentang waktu pengembalian atau pembayarannya. Selain itu, pada ayat ini juga menjelaskan tentang perlunya saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya dalam transaksi utang piutang, agar masing-masing pihak tidak dapat berlaku curang dan menzalimi pihak yang lain.

b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Selain dasar hukum yang berasal dari Al-Qur’an, terdapat pula dalam hadits seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana berikut:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

⁴¹Ibid., h. 70.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ

كُزْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ⁴²

Artinya: "Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat."⁴³

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً⁴⁴

Artinya: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali."⁴⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya memberikan utang kepada orang yang membutuhkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan bersedekah. Allah memberikan ganjaran kepada orang yang memberi utang dengan melipat gandakan dua belas kali lipat. Sedangkan

⁴² hadis bukhori

⁴³ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari*, (Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 265.

⁴⁴ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1423H), h. 812

⁴⁵ *Ibid.*

kepada orang yang bersedekah, Allah memberikan balasan dengan melipat gandakan sepuluh kali lipat saja.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan juga Hadits yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwasannya Allah tidak melarang umat-Nya untuk melakukan utang piutang terhadap sesama. Bahkan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang memberikan utang dengan balasan yang berlipat ganda.

c.Dasar Hukum dari Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satubagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁶

Selain itu, utang piutang (*qard*) juga termasuk salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., karena memberikan utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka. Dalam hal ini, Islam menganjurkannya kepada kreditur. Namun juga sebaliknya, Islam juga membolehkan kepada debitur serta tidak memasukkannya kepada kategori meminta-minta karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam pemenuhan

⁴⁶ 17Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 132.

kebutuhan hidupnya lalu mengembalikannya dengan hal yang serupa dengannya.⁴⁷

Meskipun utang piutang dibolehkan di dalam Islam, namun ada beberapa hal yang dapat membuat hukum *qard* (utang piutang) berubah dikarenakan situasi-situasi yang disebabkan oleh pihak yang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya dapat berubah sebagai berikut:

- d. *Haram*, apabila seseorang yang memberi pinjaman mengetahui bahwa pinjaman itu akan dipergunakan kepada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya seperti berjudi, untuk meminum khamar dan melakukan perbuatan haram lainnya.
- e. *Makruh*, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemashlahatan tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu pula jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman tersebut.
- f. *Wajib*, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam membutuhkan hartanya untuk menafkahi diri, keluarga dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan cara meminjam.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat *Qard*

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 115.

⁴⁸Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), h. 54.

a. Rukun *Qard*

Rukun *qard* (utang piutang) pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) yaitu *şigat*, *aqidain* dan harta yang diutangkan.

1) *Şigat* (ijab dan qobul)

Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari satu pihak untuk melahirkan adanya suatu tindakan hukum. Dengan adanya pernyataan kehendak tersebut dapat terbentuk suatu penawaran tindakan hukum yang apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak yang lain maka terjadilah akad.⁴⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya terciptalah suatu akad. Qabul terdiri atas beberapa syarat yaitu kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain.⁵⁰

Mengenai *şigat* (ijab qabul), terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *qard* dapat dilakukan dengan bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'aṭah*. Sedangkan menurut Syafiiyah cara *mu'aṭah* dipandang tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.⁵¹

2) *Aqidain*

⁴⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 127.

⁵⁰*Ibid.*, h. 132

⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuha*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, cet. I, 2011), h. 378.

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi, yakni pemberi utang (piutang) dan pengutang. Orang yang berutang dan yang berpiutang dapat dikatakan sebagai subyek hukum, dikarenakan yang menjalankan transaksi di dalam akad ini adalah kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kecakapan di antara keduanya untuk melakukan perbuatan hukum.

Seseorang yang mempunyai kecakapan adakalanya melakukan perbuatan hukum secara sempurna dan ada juga yang tidak sempurna. Perbuatan hukum yang dipandang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Selain itu juga, seseorang tersebut telah mempunyai pertimbangan pemikiran yang sempurna dan dapat melakukan perbuatan hukum dengan tidak bergantung pada orang lain.⁵² Sedangkan bagi mereka yang belum memiliki kecakapan yang sempurna dalam melakukan perbuatan hukum diperlukan izin dari walinya.

Tamyiz adalah sebuah istilah untuk seseorang yang telah dipandang cakap di dalam Islam. Dalam masa ini, seseorang telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan buruk.

Orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang

⁵² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 106.

piutang tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela di antaranya. Oleh karena itu, tidaklah sah utang piutang yang dilakukan karena adanya paksaan.

Qard juga tidak sah untuk dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengelola harta.⁵³ Hal tersebut dikarenakan *qard* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta.

3) Harta yang diutangkan

Adapun rukun dari objek *qard* antara lain:⁵⁴

- a) Harta berupa harta yang ada padanya. Maksudnya, harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda dan tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c) Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Sehingga ketika pada saat pembayaran ataupun pelunasannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai yang diterima.

Mengenai harta yang sah dijadikan objek dalam *qard* terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antaranya yaitu ulama

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 375

⁵⁴ Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 137.

Hanafiyah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak dapat terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Adapun yang diperbolehkan seperti benda-benda yang dapat ditimbang, ditakar atau dihitung.

Jumhur ulama membolehkan pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* atas manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya. Akan tetapi Ibn Taimiyah membolehkan adanya *qard* atas manfaat.⁵⁵

b. Syarat Qard

Wahbah al-zunaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:⁵⁶

1) Akad qard

Akad *qard* dilakukan dengan *sigat* ijab dan Kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikan nya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan/saling memberi saling mengerti).

Metode dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara yaitu:

a) Akad dengan lafadz

⁵⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 154.

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 172.

Akad dengan ucapan adalah shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya. Akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli hibah, sewa menyewa, dan lain-lain. Disepakati oleh jumhur ulama, kecuali akad pernikahan.⁵⁷

b) Akad dengan perbuatan

Dalam akad dengan Perbuatan, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama berbeda pendapat seperti ulama Hanafi dan Hambali membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang yang sudah diketahui secara jelas oleh manusia secara umum.⁵⁸

Mazhab Maliki membolehkan akad dengan perbuatan terhadap benda baik benda tersebut jelas diketahui oleh manusia secara umum ataupun tidak, kecuali akad pernikahan.⁵⁹

Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akad dengan

⁵⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 46.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 46.

⁵⁹ Ibn Rusyd Al-Hafizh, *Bidayah Al- Mujtahid wa An-Nihayah Al-Akhyar*, (Beirut: Ad-Daar Al-Fikr, 1990), h. 161.

perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara *sharih* atau *kinayah*. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat atau tulisan. Pendapat ini dianggap paling ekstrim.⁶⁰

c) Akad dengan isyarat

Akad seperti ini diperbolehkan bagi mereka yang tidak dapat melakukan akad secara lisan, akan tetapi jika tulisan nya baik dan dapat digunakan, lebih dianjurkan untuk melakukan akad secara tertulis.

d) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah*. Namun demikian, dalam akad nikah tidak boleh menggunakan tulisan jika kedua orang yang akad itu hadir. Hal ini karena akad harus dihadiri oleh saksi, yang harus mendengar ucapan orang yang akad, kecuali bagi orang yang tidak dapat berbicara. Ulama Syafi'iah

⁶⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 50.

dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.⁶¹

2) Para Pihak dalam Akad

Para pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad *tabarru'*, maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukum nya tidak sah. Beberapa syarat dan sebagian hukum yang berkaitan dengan Pihak dalam *qard*, diantaranya sebagai berikut:⁶²

- a) Seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman utang kepada saudaranya dengan syarat diberi pinjaman utang juga kepadanya manakala dia sudah mengembalikan utangnya. Hal ini tidak dibolehkan karena memberi pinjaman dengan adanya syarat tertentu sama saja dengan mengambil keuntungan dan keuntungan dari suatu pinjaman utang adalah termasuk ke dalam riba.
- b) Hendaknya pemberi utang adalah orang yang boleh bertindak (berwenang pada hartanya), dewasa, berakal, dan sesuai dengan syariah. Dengan demikian pemberiannya adalah sah.
- c) Pemberi utang tidak boleh mensyaratkan kelebihan atas pengembalian dalam pinjaman tersebut. Hal ini tergolong ke dalam

⁶¹ *Ibid.*, h. 50.

⁶² *Ibid.*, h. 51.

bentuk riba. Pemberi pinjaman dilarang untuk mengambil kelebihan dan hanya diperbolehkan untuk mengambil uang yang diutangkan saja.

d) Bila yang berutang (debitur) membayar kepada pemilik piutang (kreditur) dengan memberikan kelebihan ataupun memberikan sesuatu yang tidak disyaratkan oleh pihak kreditur, maka hal ini sah karena ini adalah pemberian sukarela dan pembayaran yang baik dari pihak debitur.

e) Pemberi utang (kreditur) hanya boleh memberikan utang kepada debitur terhadap harta yang dimilikinya.

f) Transaksi yang dilakukan oleh bank-bank di zaman sekarang termasuk ke dalam muamalah yang dilarang karena mengandung unsur riba, yakni berupa akad pemberian kredit antara pihak bank dengan orang yang membutuhkan. Lalu pihak bank memberikan sejumlah uang kepada mereka sebagai ganti dari bunga yang telah ditentukan di mana pihak bank mengambil bunga atas sejumlah uang pinjaman, atau pihak bank dengan yang berutang (debitur) sepakat atas nilai jumlah utang kemudian bank memberinya jumlah yang lebih rendah daripada jumlah yang telah disepakati dengan ketentuan pihak yang berutang (debitur) tetap harus membayar keseluruhan. Misalnya seorang debitur berutang uang ke bank sejumlah 100.000, lalu bank hanya memberinya 80.000 saja, dengan memberikan persyaratan kepada pihak yang berutang (debitur)

untuk tetap harus membayar 100.000. ini termasuk riba yang juga diharamkan.

3) Hata Sebagai Objek *Qard*

Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada pada umumnya dipasaran, dan diketahui nilainya, sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.

4) Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.

Al-zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard*, pertama, *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qard*, pihak peminjam tidak mengulur-ngulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan.

Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qard*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qard*.

Berbagai syarat yang telah dijelaskan di atas harus terpenuhi saat akad *qard*. Sah atau tidaknya suatu akad tergantung terpenuhi atau tidaknya rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku.

4. Macam-Macam *Qard*

Adapun macam-macam dari *qard* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁶³

a. *Qardh al-hasan*,

Yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *qardh al-hasan* ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *Gharim* yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Melalui *qardh al hasan* maka dapat membantu sekali orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjam. Keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 123.

b. *Al-qardh*

Yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

5. Berakhirnya Akad *Qard*

Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang berutang wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi utangnya.

Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa penangguhan tidak diperbolehkan di dalam utang karena hal ini adalah kebaikan semata dan kreditur boleh meminta gantinya seketika itu juga. Oleh karenanya, meskipun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu maka hal tersebut tetap saja dianggap jatuh tempo.

Namun, apabila orang yang berutang tersebut sedang dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk memberi kemudahan dengan adanya penangguhan pembayaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-baqarah (2) ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^ص

Artinya: *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*⁶⁴

C. Riba

1. Pengertian Riba

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di dalam ajaran Islam adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan di kalangan umat Islam. *Pertama*, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. *Pendapat kedua* mengatakan bahwasannya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.⁶⁵

Secara etimologi, riba berarti tambahan. Adapun yang dimaksud dengan hal tersebut adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit ataupun banyak. Riba menurut istilah adalah tambahan yang didapat dari modal harta yang dijadikan sebagai imbalan terhadap adanya penundaan waktu.⁶⁶ Ulama fikih mendefinisikan riba yaitu adanya suatu kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak adanya imbalan gantinya. Maksudnya, tambahan

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008). h. 37

⁶⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 159.

⁶⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005), h. 248.

terhadap modal uang yang timbul sebagai akibat adanya suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo.⁶⁷

Namun tidak semua tambahan termasuk ke dalam riba menurut syariat, dan bukan semua tambahan dalam jual beli termasuk ke dalam riba. Jika dua benda yang dipertukarkan tidak termasuk ke dalam benda-benda ribawi, maka tambahan padanya tidaklah termasuk riba. Akan tetapi, jika terjadi pada dua benda yang haram adanya selisih harga padanya maka hal tersebut adalah tambahan yang tergolong ke dalam riba. Menurut pandangan ulama, seluruh riba yang dilarang dalam Al-Quran adalah adanya pemaksaan beban utang terhadap debitur yang melanggar pelunasan utang sampai batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam Sunnah dikaitkan dengan bentuk aktivitas transaksi jual beli.⁶⁸

2. Dasar Hukum Riba

a. Dasar Hukum Riba dari Al-Qur'an

Sudah diketahui bahwa dalam Islam riba sudah dilarang dan bahkan dikategorikan sebagai dosa besar. Seperti halnya disampaikan dalam firman Allah surat Ar-rum ayat 39 sebagai berikut:

⁶⁷ Setiadi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, cet. I, 1996), h. 1497.

⁶⁸ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 458.

وَمَا أَتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

وَمَا أَتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”⁶⁹

Berdasarkan ayat di atas Allah menyatakan secara nasehat bahwa Dia tidak menyukai orang yang melakukan riba. Dalam hal ini, Allah menolak anggapan bahwasannya harta yang diberikan kepada orang lain sebagai bentuk pertolongan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, Allah sangat memuliakan umat-Nya yang memberikan sedekah dari harta yang dicintai dan Allah akan memberikan balasan berlipat-lipat ganda.

Selanjutnya berdasarkan firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 160-161 yang berbunyi:

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008). h. 326.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

وَبَصَدَّهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ

نُهِوا عَنْهُ وَأُكِّلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah (160). Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka telah memakan harta orang dengan cara yang *bāṭil*. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih (161).”⁷⁰

Ayat di atas menggambarkan bahwa riba adalah perbuatan yang zalim dan *bāṭil*. Ayat ini lebih khusus membahas kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi pada saat itu. Oleh karena itu, Allah akan menurunkan azab yang pedih untuk orang-orang kafir yang masih menjalankan riba.

Dipertegas kembali dalam firman Allah surat Al-baqarah (2) ayat 275 tentang pengharaman riba sebagai berikut:

⁷⁰ *Ibid*, h. 84.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."⁷¹

b. Dasar Hukum Riba dari Hadits

Dasar hukum riba berdasarkan riwayat Imam al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda:

⁷¹ Ibid., h. 34.

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ،
وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ،
وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ

المؤمنات⁷²

Artinya: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina".⁷³

Hadits di atas menjelaskan bahwa ketujuh perkara yang dapat membinasakan umat Islam salah satunya adalah perbuatan riba, artinya perkara mengenai perbuatan riba sangat jelas dilarang dengan tegas dan diharamkan dalam Islam.

c. Dasar Hukum dari Ijma'

Adapun Pendapat Ulama tentang 'illat riba adalah sebagai berikut:

1. Madzhab hanafi

Illat riba fadhl menurut ulam' hanafiyah adalah jual –beli barang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan anggur kering . Dengan kata lain , jika barang–

⁷² Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Muslim Juz IV*, (Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 12.

⁷³ *Ibid.*,

barang yang sejenis dari barang–barang yang telah disebut di atas, seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadhl.

2. Madzhab Malikiyah

Illat diharamkannya riba menurut Ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'a dan riba fadl.

3. Madzhab Syafi'i

Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitupula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uangpun dapat menjadi harga sesuatu.

4. Madzhab Hambali

Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang illat riba, yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama hanafiyah. Hanya saja ulama, Hanabilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang satu kurma.

3. Jenis-Jenis Riba

Riba dalam Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu ada riba yang timbul karena adanya utang piutang (riba *dayn*) dan ada pula yang timbul dalam perdagangan (riba *bai'*).

- a. Riba *bai'* terdiri dari dua jenis yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba *faḍl*) dan riba yang terjadi karena

adanya pertukaran barang sejenis dengan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba *nasi'ah*).⁷⁴ Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya riba *nasi'ah* juga termasuk ke dalam bagian riba pinjaman ataupun utang piutang.

- b. riba *dayn* berarti tambahan yaitu pembayaran “premi” atas setiap pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba dilakukan dengan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bāṭil*. Dikatakan *bāṭil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.⁷⁵ Riba *qarḍ* merupakan salah satu bentuk riba dalam utang piutang dimana seseorang meminjamkan kepada orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa seseorang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu. Selain itu juga bisa diartikan dengan adanya tambahan yang diberikan secara berkala baik dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun selama modal hutang belum dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang.⁷⁶
- c. Riba *nasi'ah* disebut juga sebagai riba *al-duyūn*, karena terjadi pada utang piutang dan disebut juga sebagai riba *jāhiliyah* karena sering terjadi pada masyarakat jahiliyah. Sebagian ahli fikih menyebut riba *nasi'ah* ini sebagai riba *jally* atau jelas dikarenakan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran atau

⁷⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 13

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 337.

disebut juga sebagai riba *qat'ī* atau tegas karena tegas pelarangannya di dalam Al-Quran.⁷⁷

Praktik riba *nasī'ah* ini pernah dipraktikkan oleh kaum Thaqif yang biasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikkannya sehingga turunlah ayat yang mengharamkannya. Ayat pengharaman riba ini membuat heran orang musyrik terhadap larangan praktik riba, karena telah menganggap jual beli itu sama dengan riba.⁷⁸

Adapun yang dimaksud dengan riba *nasī'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Apabila orang yang berutang tidak dapat membayar modal pokok beserta kelebihannya pada saat telah jatuh tempo, maka orang tersebut diberikan perpanjangan masa pengembalian dengan konsekuensi adanya pertambahan jumlah utangnya.⁷⁹ Berbeda halnya dengan tambahan yang diberikan oleh orang yang berutang kepada orang yang berpiutang ketika membayar dan tidak adanya syarat sebelumnya. Dalam hal ini tidak termasuk ke dalam riba yang diharamkan.

⁷⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 165

⁷⁸ Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), h. 147.

⁷⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1498

Tambahan yang demikian diperbolehkan bahkan dianggap sebagai perbuatan yang *ihsān* (baik) dan Rasulullah pernah melakukannya.⁸⁰

Adapun Unsur-unsur riba *nasī'ah* yang dilakukan oleh masyarakat pra Islam di antaranya:⁸¹

- d. Adanya tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
- e. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
- f. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dari tenggang waktu.
- g. Unsur yang disebut terakhir ini mengandung pengertian bahwa adanya unsur keempat yang membentuk riba yaitu adanya tekanan dan kezaliman.

Para ahli fikih membedakan antara tambahan yang dikatakan sebagai riba dan tambahan yang bukan termasuk ke dalam riba. Adapun yang termasuk ke dalam riba adalah tambahan yang disyaratkan di awal perjanjian dan dapat digambarkan adanya tekanan terhadap diri peminjam atau debitur. Maksud dari adanya tekanan di sini yakni pihak kreditur akan memberikan pinjaman apabila pihak debitur setuju untuk memberikan tambahan dari pokok pinjaman sebagai persyaratan awal perjanjian.⁸² Inilah yang dimaksud sebagai tekanan yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur.

Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa riba memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya keleluasaan untuk menekan

⁸⁰ Quraish Shihab, *Riba Menurut al-Quran, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), h. 136.

⁸¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 167.

⁸² *Ibid.*, h. 168.

dan memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang berutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya.⁸³

4. Sebab-Sebab diharamkannya Riba

Emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga-harga yang kepadanya penentuan nilai barang dikembalikan. Sementara itu, keempat benda lainnya adalah unsur-unsur makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Apabila riba terjadi pada barang-barang ini, maka akan menimbulkan bahaya dan menimbulkan kerusakan dalam bermuamalah. Oleh karena itu, Islam melarangnya sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap maslahat-maslahat mereka.⁸⁴ Dari sini tampak jelas bahwasannya *illat* pengharaman riba pada emas dan perak dikarenakan keduanya adalah sebagai alat pembayaran. Sementara *illat* pada barang yang lain adalah keberadaannya sebagai makanan pokok.

Imam Razi menjelaskan beberapa alasan pelarangan riba. Pertama, karena riba mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Kedua, riba menyebabkan seseorang malas bekerja dan berbisnis. Ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia. Keempat, riba dapat menyebabkan krisis

⁸³ Choitotunnisa, *Bisnis Halal Bisnis Haram*, (Jombang: Lintas Media, 2007), h. 95.

⁸⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.

ekonomi dan yang *kelima* riba sudah jelas pelarangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah.⁸⁵

Selain itu, Rasulullah juga pernah menunjukkan bagaimana urgensinya pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwasannya pemberian hibah yang tak lazim atau sekedar memberi tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba.⁸⁶ Jadi, pelarangan riba tidak hanya berlaku pada perjanjian atas kelebihan terhadap harta pokok atau modal saja, tetapi juga berlaku kepada pemberian yang tidak lazim karena adanya perasaan ringan dikarenakan adanya transaksi pinjaman atau utang piutang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Muh. Mahfud, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

⁸⁵ Adiwarmarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 71.

⁸⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 13.

lapangan, pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada tempat penelitian di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Hasil penelitian yang didapat dalam skripsi ini adalah bahwa arisan dengan sistem iuran menggunakan akad utang-piutang dengan pihak-pihak yang ada sebagai anggota arisan, tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang piutang yang dilarang dalam hukum Islam.

2. Skripsi Hadi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Alaudin Tahun 2018 dengan judul “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomancang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada tempat penelitian di Desa Paomancang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian yang didapat dalam skripsi ini adalah bahwa arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paomancang menggunakan sistem Tawaran atau lelang yang mengandung unsur riba, *gharar*, dan maisir yang termasuk kedalam kegiatan yang diharamkan dalam Islam, meskipun dalam praktiknya terdapat kesepakatan yang diperjanjikan.

Adapun pemilihan yang penulis teliti mengenai ketentuan hukum Islam terkait praktik arisan di Persatuan Keluarga Daerah Piaman Bandar Jaya yang menggunakan sistem bayaran dalam pemilihan pemenang

arisan dan dengan adanya penelitian terdahulu sebagai acuan juga sebagai orisinalitas terhadap penelitian yang akan penulis bahas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- , *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Gozali, *Cashflow for Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*, Bandung: PT MizanPublika, 2005.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari*, Daar Ibnu Katsir, 1423H.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* Bandung: Diponegoro, 2014.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1423H.
- Ibn Rusyd Al-Hafizh, *Bidayah Al- Mujtahid wa An-Nihayah Al-Akhyar*, Beirut: Ad-Daar Al-Fikr, 1990.
- Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moersaleh dan Musanef, *Pedoman Pembuatan Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- M. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani, *Hukum Keuangan Islam*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 1992.
- Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Setiadi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, cet. I, 1996.
- Sohari dan Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suharsini Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suryabrata Sumardi, *metode penelitian*, Cet ke II, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998.

Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Psuat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuha*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, cet. I, 2011.

